



KOPI, Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang khusus mendedikasikan diri untuk membantu masyarakat Suku Mori resmi didirikan di Jakarta. Lembaga yang diberi nama Solidaritas Wita Mori, disingkat TOMORI, ini dibentuk dalam rangka memberikan perhatian dan partisipasi kongkrit bagi pembangunan kampung halaman para perantau dari suku Mori di Jakarta dan wilayah lainnya di Indonesia. Demikian penjelasan sekilas dari Ketua Umum TOMORI, Drs. Margany Kenda, MM didampingi Sekretaris Umum, Drs. Esaf Sanger bersama pengurus lainnya kepada pewarta KOPI, Senin (21/2/2011) di Jakarta.

"Selama ini, kita cukup sibuk berusaha memperbaiki taraf hidup kita dan keluarga masing-masing di perantauan. Sementara itu keluarga kita di kampung halaman di wilayah Mori sana jauh tertinggal dari saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita terpanggil secara moral untuk berbuat sesuatu guna membangun kampung halaman," ujar Margany Kenda, pensiunan PNS Kementerian Dalam Negeri, yang telah berdiam di Jakarta selama lebih dari 20 tahun.

Sementara itu, tokoh masyarakat Mori di Jakarta, Pdt. Dr. M. Yudson Kasodu, S.Th, MA, yang didaulat sebagai Dewan Penasehat LSM TOMORI, menyampaikan keinginannya untuk berbakti kepada tanah leluhur tempat kelahirannya, melalui sumbangsih sosial yang bisa dilakukan di usia yang masih tersisa. "Di usia yang sudah kepala tujuh ini, saya ingin sekali memberikan sesuatu yang mudah-mudahan punya makna bagi kampung halaman saya di Wita Mori (Tanah Mori - red)," kata Yudson Kasodu yang lazim disapa Om Kasodu.

Sebagai informasi bersama, Suku Mori adalah kelompok masyarakat yang mendiami daerah pertengahan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, berbatasan dengan daerah Suku Pamona (Poso) di utara, Suku Kaili di sebelah barat, Suku Toraja dan Bungku di selatan, dan Suku Ampana dan Suku Wana di sebelah timur. Masyarakat Suku Mori terdiri atas dua kelompok utama berdasarkan bahasa yang digunakan, yakni Mori Atas meliputi Tomata, Taliwan, Ensa, Londi, dan sekitarnya; dan Mori Bawah meliputi Beteleme, Wawopada, Bunta, hingga Kolonodale. Seluruh daerah pemukiman Suku Mori tersebut saat ini masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali.

Di era otonomi daerah dan pemekaran wilayah beberapa tahun belakangan, pembangunan sangat terasa dampaknya bagi masyarakat hingga ke pelosok desa dan perkampungan. Demikianlah yang terjadi di daerah persukuan Mori. Sebagaimana halnya di daerah lainnya di Indonesia, pembukaan sentra-sentra ekonomi baru dengan memanfaatkan sumber daya alam hutan dan wilayah yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat desa-desa Suku Mori menjadi tidak terhindarkan. Hal ini pada satu sisi merupakan rahmat bagi penduduk, namun pada sisi lain terbetik sebuah kekhawatiran terhadap eksploitasi ekonomis semata atas harta kekayaan alam milik persukuan dengan mengabaikan eksistensi masyarakat setempat.

"Untuk menjaga kemungkinan negatif atas gencarnya para investor masuk ke wilayah orang tua kita di Mori, kita perlu membantu mereka memahami dan mengantisipasi akibat buruk yang akan muncul di kemudian hari," ujar Esaf Sanger. Penduduk kampung halaman kita, lanjut Esaf, tentu sangat senang dengan kedatangan para investor yang akan mengelola tanah-tanah mereka dengan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan lain-lain.

"Tapi perlu dicermati benar sebelum melakukan ikatan hukum dengan para investor itu, jangan sampai karena tidak tahu, tidak mengerti aturan-aturan perkebunan, pertambangan dan proses investasi, malah kehilangan hak atas tanah-tanah mereka. Akhirnya, mereka tidak punya apa-apa lagi," tandas Esaf.

Di tempat terpisah, Wilson Lalengke yang juga putra asli Suku Mori dari desa Kasingoli, Kecamatan Mori Atas menyatakan kekusarannya. Betapa tidak, pengalaman berbagai komunitas warga masyarakat di hampir seluruh wilayah di tanah air yang tergerus lahan pertaniannya, lahan hutan tempat menggantungan hidup sehari-hari, tertimpa bencana-bencana yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, seharusnya menjadi refleksi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Morowali, khususnya di Tanah Mori.

"Saya merasa perlu pulang kampung untuk melihat dan mengumpulkan informasi, data, dan lain-lain berkenaan dengan kondisi daerah serta keadaan masyarakat Suku Mori. Jika kita dapatkan sesuatu kebijakan investasi dan pembangunan yang diprediksikan akan menimbulkan penistaan kemanusiaan masyarakat di perkampungan Mori, tentu kita harus cegah hal itu jangan dilanjutkan," tegas Wilson yang sehari-hari bertugas di Sekretariat Jenderal DPD-RI, Jakarta.

LSM Solidaritas Wita Mori Siap Perjuangkan Nasib Masyarakat Mori

Oleh : Hermanto Werampado'a
Senin, 21 Pebruari 2011 18:26

Kehadiran LSM TOMORI kiranya akan mampu menjawab kebutuhan kekinian warga Mori di kampung halaman. Setiap warga rantau di mana saja berada yang merasa sebagai bagian dari Suku Mori pada hakekatnya terpanggil untuk membantu, menjaga, dan memberdayakan "pe'etu saru mia mota'u" (saudara-saudara dan orang tua - red) kita di Wita Mori. HW***